

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*sakinah*) dengan cara-cara yang di ridhoi Allah SWT. Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa berlangsungnya sebuah pernikahan harus diiringi dengan kerelaan antar calon pengantin.¹ Perkawinan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia dimuka bumi ini walaupun ada beberapa di antaranya yang tidak terikat dengan perkawinan sampai rajal menjemput. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati, dan harus dijaga kelanggengannya.² Oleh karena itu, setiap orang tua merasa tugasnya sebagai orang tua telah selesai bila anaknya telah memasuki jenjang perkawinan.

Pernyataan penyerahan mempelai wanita kepada mempelai laki-laki, yang diucapkan oleh ayah dalam kedudukannya, sebagai wali nikah, dapat dilambangkan sebagai akhir tugas yang berhasil dan orang tua di

¹ www.pengertianpakar.com. Artikel 3 Maret 2015. Diakses 11 Oktober 2017.

² Rien G. Kartaapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal. 97

dalam tugasnya untuk memenuhi kebutuhan materiil dan sepirituil anak gadisnya, sehingga anak gadisnya menjadi dewasa dan siap untuk membentuk rumah tangga yang berdiri sendiri. Selesaiannya ijab kabul itu, maka tugas orang tua beralih kepada suaminya.³ Banyak pendapat umum yang mengatakan bahwa orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan dihargai daripada mereka yang belum melakukan perkawinan. Bagi kaum wanita dengan perkawinan maka akan memberinya kedudukan sosial yang lebih tinggi, karena statusnya sebagai isteri ia akan mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan perbuatan hukum yang sebelumnya tidak dapat dilakukannya sebelum menikah, yaitu antara lain seseorang isteri berhak untuk memperoleh mahar, nafkah, pakaian, tempat tinggal dan perlakuan yang baik serta dapat mewaris harta suaminya. Bahkan, sebagian orang berpendapat bahwa hidupnya telah lengkap apabila mereka telah melangsungkan perkawinan. Dengan telah terpenuhi segala kebutuhan hidupnya itu, manusia diharapkan lebih dapat mengaktualisasikan diri dalam rangka mempertahankan eksistensinya.⁴

Perkawinan di Indonesia diatur dalam suatu Undang-Undang Perkawinan Nasional, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1 Tambahan Lembaran Negara No. 3019) dan untuk pelaksanaannya dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah

³ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 5.

⁴ *Ibid.* Hal 6

Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 yang mengatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Hal ini berarti sejak saat itu pula secara yuridis formal berlaku suatu hukum nasional yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia, dengan demikian secara resmi menghapus segala peraturan hukum perkawinan yang berlaku sebelumnya, yaitu ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wet boek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesien Stb 1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de 8 Gemengde Huwelijken Stb 1898 No. 158*) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan.⁵ Dalam Bab I Pasal 1 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa landasan perkawinan adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut aturan agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan segi formalnya perkawinan itu harus dicatatkan pada kantor pencatatan sipil dan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan selain

⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982.

⁶ Soedaryono Soemin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Sinar Grafika, 1992, hal 6.

agama Islam dan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam bidang pembangunan keagamaan (Islam) dalam wilayah Kecamatan. Melaksanakan tugas – tugas pokok Kantor Urusan Agama dalam pelayanan Munakahat, Perwakafan, Zakat, Ibadah Sosial, Kepenyuluhan dan lain-lain, membina Badan / Lembaga Semi Resmi seperti MUI, BAZ, BP4, LPTQ dan tugas Lintas Sektoral di wilayah Kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA Kecamatan menjalankan tugas fungsi :

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

10. Pelaksanaan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Untuk itu, KUA mempunyai fungsi melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. Bab I Pasal 2 Keputusan Menteri Agama 517 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya :

1. Penataan Internal Organisasi.
2. Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).
3. Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
4. Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
5. Pelayanan Hewan Kurban.
6. Pelayanan Hisab dan Rukyat.

Selanjutnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tingkat Kecamatan di samping mempunyai tugas untuk melakukan pencatatan nikah, juga dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul mengenai perkara - perkara yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan, baik itu menyangkut permasalahan wali, calon pengantin maupun syarat-syarat lain. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pegawai pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. PPN juga harus segera menyelesaikan dan mencari jalan keluar apabila timbul sengketa antara pihak-pihak yang berkaitan dengan sahnya pernikahan seperti adanya sengketa wali *Adhal*.

Wali *Adhal* adalah wali calon pengantin wanita, (ayah, kakek, saudara laki - laki atau kelompok wali *akrob*) yang enggan untuk menikahkan calon pengantin karena alasan - alasan tertentu. Adakalanya perkawinan yang telah disepakati atau disetujui oleh calon suami maupun calon isteri tetapi ternyata ada pihak lain yang keberatan, pihak lain dapat dipahami, yaitu wali nikah, padahal wali nikah adalah merupakan salah satu rukun nikah, dalam sabdanya Rasulullah Saw mengatakan “Tidak ada Nikah tanpa wali” artinya perkawinan tidak sah apabila tidak disetujui oleh wali nasabnya.

Apabila wali nikahnya tidak setuju, dapat dipastikan akan terjadi sengketa dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan, dan pihak pencatat atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan menolak melakukan pencatatan, maka ada dua pilihan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, pilihan yang pertama yaitu melalui mediasi atau *tabayyun* kepada Wali nikah, agar wali nikah setuju dan mau menjadi wali nikah atau jalan kedua apabila jalan pertama menemui kebuntuan, yakni mengajukan sengketa antara calon pengantin dan walinya, kepada Pengadilan Agama (PA) atau Mahkamah Syar'iyah untuk mendapat putusan bahwa walinya *Adhal* atau enggan atau membangkang.

Apabila dianalisis mengenai kasus tersebut diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya sengketa wali *Adhal* dalam pelaksanaan perkawinan karena faktor perbedaan suku bangsa, berbeda agama, tidak sederajat dalam kehidupan sosial ekonomi dan mempelai laki - laki tidak

diketahui dengan jelas mengenai asal usulnya. Akibat hukum yang timbul adalah terjadi perselisihan hingga sampai ke Pengadilan Agama sehingga pelaksanaan perkawinan harus melalui wali hakim dengan penetapan apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara mediasi dan musyawarah dengan perantaraan Pegawai Pencatat Nikah atau BP4 Kecamatan.

Penyelesaian sengketa wali *Adhal* dalam pelaksanaan perkawinan di Kabupaten Pati, pada awalnya dilakukan koordinasi dengan BP4 kecamatan di domisili mempelai. Selanjutnya diupayakan untuk dilakukan mediasi atau *tabbayun*. Dalam hal mediasi berhasil, maka pernikahan dapat dilanjutkan sampai ke pencatatan sipil, namun apabila mediasi gagal dilakukan, maka diajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh penetapan wali hakim dari Pengadilan Agama. Menurut analisis penulis kasus wali *adhal* yang sampai ke Mahkamah Syar'iyah, sebenarnya menimbulkan dampak psikologis, baik bagi calon pengantin, wali dan dua keluarga besar, yaitu keluarga calon pengantin perempuan maupun keluarga calon pengantin laki - laki. Hal itu tentu saja sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kasus pernikahan dengan wali *adhal* yang berakhir di Pengadilan Agama, juga akan menambah beban finansial bagi calon mempelai yang pada akhirnya akan ditanggung oleh calon mempelai, belum lagi waktu yang tersita untuk berperkara di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal seperti itu dan untuk lebih memantapkan suatu persiapan perkawinan, pihak PPN, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), ataupun Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) selalu membimbing masyarakat agar dalam merencanakan perkawinan agar tercipta keluarga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*.

Suatu perkawinan itu bukan merupakan perbuatan hukum saja, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan.⁷ Sah atau tidaknya perkawinan tergantung pada agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 haruslah benar - benar atas dasar suka rela dan tidak ada unsur paksaan. Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam masyarakat Indonesia yang beragama Islam menggunakan Hukum Islam untuk mengatur masalah perkawinan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Maksudnya bahwa perkawinan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat - syarat dan rukun - rukunnya. Apabila syarat - syaratnya tidak lengkap maka perkawinan tersebut menjadi tidak dapat dilangsungkan, dan apabila salah satu

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, 1990, hal. 7.

dari rukunnya tidak ada maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah atau menjadi batal. Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun - rukun untuk sahnya perkawinan (nikah) menurut Hukum Islam,

Peranan wali nikah dalam perkawinan sangat penting dan menentukan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Menurut Hukum Islam, wali nikah itu sangat penting peranan dan keberadaannya, sebab ada atau tidaknya wali nikah tersebut menentukan sahnya dari suatu perkawinan. Wanita yang dinikahkan atau dikawinkan tanpa persetujuan walinya maka perkawinannya tersebut adalah batal, untuk seorang laki-laki, pernikahan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan ayah kandung adalah sah kalau dilakukan dengan alasan yang Islami, akan tetapi untuk seorang wanita pernikahannya adalah tidak sah, karena ada masalah yang menyangkut dengan wali nikah yaitu ayahnya sebagai wali nasab selain itu dia dinilai telah melakukan dosa besar berupa sikap yang nyata - nyata telah menyakiti hati orang tuanya.⁸

Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain, yang bertindak

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 10.

sebagai wali adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat - syarat tertentu.⁹ Karena kedudukan Wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Salah satu kasus wali adhal di Kabupaten Pati yang ditemukan oleh peneliti berawal dari adanya permasalahan antara seorang anak perempuan dan ayah kandung dikarenakan ayah kandung tidak setuju dengan kekasih yang menjadi pilihan anaknya, sehingga pernikahan anak tersebut tidak ada restu dari orang tua dan akhirnya orang tua tidak berkenan menjadi wali atas pernikahan anak tersebut. Atas peristiwa tersebut seorang anak mencari solusi agar dapat melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya yaitu dengan datang ke Kantor Urusan Agama (KUA), akan tetapi petugas KUA menolak pernikahan anak perempuan tersebut karena syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi. Atas dasar penolakan dari KUA kemudian anak perempuan tersebut mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Pati untuk menetapkan walinya *adhal*, selanjutnya proses acara terhadap permohonan diputus oleh Hakim Pengadilan Agama dan menunjuk petugas KUA untuk menjadi wali menikahkan anak perempuan tersebut.

Keadaan sebagaimana latar belakang di atas masih terjadi di Kabupaten Pati, meskipun kejadiannya tidak pasti dalam setiap tahun, namun pasangan yang melakukan pernikahan oleh wali Hakim

⁹ Dr. Fuad Mohd Fachruddin, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, hlm. 26.

masih ada walaupun walinya ada tetapi *adhal*. Berawal dari fenomena di atas, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap mekanisme permohonan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pati (Studi Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2018/Pa.Pt.).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana mekanisme permohonan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pati ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pati ?
3. Bagaimana akibat hukum pernikahan terhadap wali adhal di Pengadilan Agama Pati ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme permohonan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pati.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pati.
3. Untuk mengetahui akibat hukum pernikahan terhadap wali adhal di Pengadilan Agama Pati.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai mekanisme permohonan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pati (Studi Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2018/Pa.Pt.). ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada pengembangan dan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Perdata.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, terutama kepada pemerintah dan masyarakat dalam hal mekanisme permohonan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pati (Studi Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2018/Pa.Pt.).

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitannya. Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yakni tentang tinjauan umum tentang wali nikah, tinjauan umum perkawinan, .

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi mekanisme permohonan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pati, pertimbangan Hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pati, dan akibat hukum pernikahan terhadap wali adhal di Pengadilan Agama Pati.

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak – pihak yang terkait dengan mekanisme permohonan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pati (Studi Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2018/Pa.Pt.).